



RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BANYUATES

**KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2019-2024**

**PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
2019**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kecamatan merupakan perangkat Daerah Kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.

Berangkat dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan, baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dimaksud. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan mamnfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula.

Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Sesuai amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 15, Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah. Dalam rangka penyusunan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi yang berpedomann pada dokumen perencanaan daerah maupun dokumen terkait lainnya.

Renstra Perangkat Daerah berfungsi untuk mengklarifikasikan secara eksplisit visi dan misi Bupati yang tertuang dalam RPJMD, kemudian menerjemahkan secara strategis, sistematis, dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program prioritas pembanguan daerah serta tolok ukur pencapaiannya. Renstra dapat membantu dalam mengungkapkan tujuan dan mengidentifikasi langkah-langkah menuju tercapainya tujuan tersebut, serta menciptakan fokus dan kemampuan organisasi terhadap perubahan internal dan eksternal.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Banyuates tahun 2019-2024, adalah dokumen perencanaan Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2019 sampai dengan 2024. Rencana Strategis Kecamatan

Banyuates Kabupaten Sampang ini disusun dengan maksud menyajikan gambaran rinci tentang rencana kerja 5 (lima) tahunan dari penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sampang 2019 – 2024.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Banyuates memiliki keterkaitan dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya sebagai berikut:

1. Renstra tahun 2019-2024 ini berpedoman pada RPJMD tahun 2019-2024 dan merupakan pelaksanaan program-program rencana pembangunan jangka menengah Daerah(RPJMD) Kabupaten Sampang dan sekaligus mempertimbangkan azas berkelanjutan dengan program-program pembangunan sebagaimana dimuat dalam Renstra Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang
2. Renstra Tahun 2019-2024 ini memperhatikan arahan kebijakan dan program pembangunan yang ada pada RPJM Propinsi Jawa Timur dan RPJMD Kabupataen Sampang
3. Renstra Tahun 2019-2024 ini dijababrkan dalam Rencana Kerja Tahunan(RKT) SKPD pada setiap tahunnya selama kurun waktu perencanaan dan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD

Dokumen perencanaan ini diharapkan mampu menjaga konsistensi dan komitmen pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah serta mengoptimalkan implementasi program / kegiatan dalam rangka pencapaian Visi Kabupaten Sampang 2019 – 2024 yaitu : “ **Sampang Hebat Bermartabat** ”

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum merupakan penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah. Adapun landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Bappelitbangda Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 104, Tambahan Negara Republik Indonesia No. 4421)
4. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah

- Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2006 Nomor 7);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 1);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 adalah untuk merumuskan strategi dan kebijakan jangka menengah dalam menyusun perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang koordinatif, sinergi, dan akuntabel selaras dengan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024.

Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang 2019-2024 adalah untuk:

1. Tersedianya dokumen penjabaran RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Banyuates;
2. Tersedianya dokumen acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Banyuates;
3. Tersedianya dokumen yang digunakan sebagai pedoman dan tolok ukur pengendalian dan evaluasi kinerja yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Banyuates dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renstra Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Bagian ini

B III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Banyuates
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

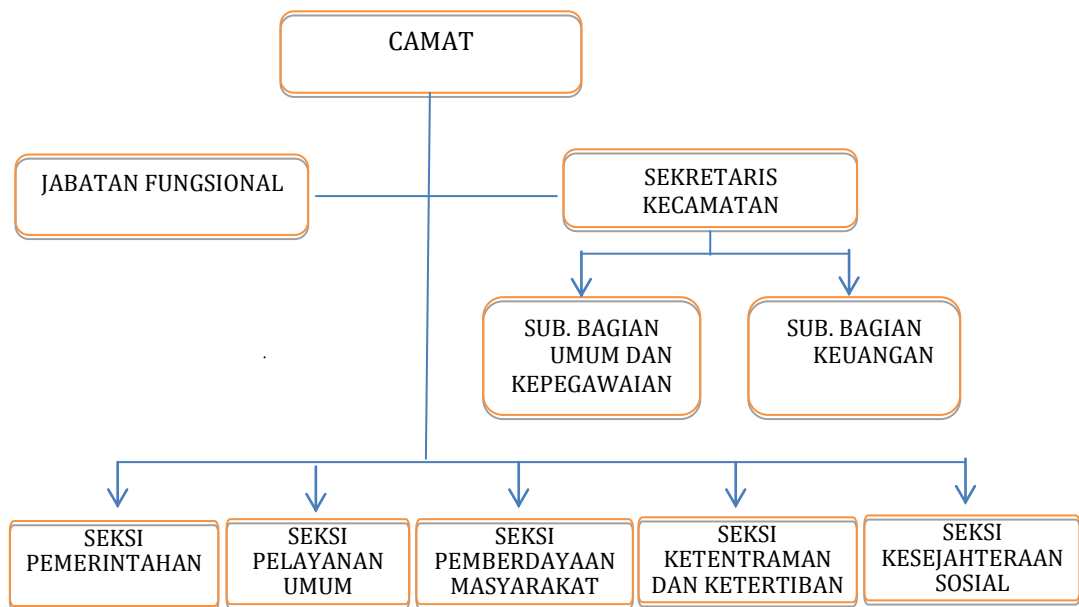
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Organisasi Pemerintah Kecamatan Banyuates di Kabupaten Sampang didasarkan dan berlandaskan pada :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang : Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Sampang.
2. Peraturan Bupati Sampang No. 72 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Sampang.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Perbup No. 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang, adapun struktur organisasi Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang sesuai dengan Keputusan tersebut dapat dilihat pada bagan berikut ini:



Sumber : Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang, 2019

Gambar 2.1
Susunan Organisasi Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang

Dalam Peraturan Bupati Sampang No. 72 tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, ditegaskan bahwa kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud Kecamatan mempunyai tugas:

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;

- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di Kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Adapun **susunan Organisasi** Kecamatan Banyuates terdiri atas :

- a. Camat;**
- b. Sekretariat, membawahi :**
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan.
- c. Seksi Pemerintahan;**
- d. Seksi Pelayanan Umum;**
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;**
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial;**
- g. Seksi Ketentraman dan Ketertiban.**

Uraian dari Susunan Organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Mempunyai tugas membantu camat dalam kesiapan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program, hubungan kerja dibidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dan pengkoordinasian kegiatan dilingkungan kecamatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Sekretariat mempunyai fungsi :

- 1. Penyusunan perencanaan, pengendalian dan penyiapan bahan evaluasi pelaksana kegiatan kecamatan;
- 2. Pengelolaan urusan Keuangan Kecamatan
- 3. Pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian dan tata usaha perlengkapan Kecamatan;
- 4. Pelaksanaan Urusan Rumah Tangga Kecamatan;

5. Penyelenggaraan hubungan kerja dibidang administrasi dengan satuan kerja perangkat kerja terkait;
6. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Camat yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya;

Sekretariat membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Keuangan dan Program

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja sub bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan surat menyurat dan ketatalaksanaan
- c. Melakukan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian;
- d. Menyusun Rencana kebutuhan dan mendistribusikan barang perlengkapan
- e. Menyiapkan Bahan Untuk Penghapusan dan inventarisasi barang.
- f. Melakukan Pengelolaan administrasi naskah dinas
- g. Melakukan keprotokolan dan mengurus perjalanan dinas serta hubungan masyarakat
- i. Menyiapkan sarana dan prasarana rapat dinas, serasehan, seminar, acara pembinaan, upacara dan kunjungan Kerja
- j. Melakukan upaya peningkatan dan pengawasan disiplin pegawai, dan
- k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Sub bagian Keuangan
- b. Menghimpun bahan perencanaan program dan anggaran
- c. Melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
- d. Melaksanakan verifikasi dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- e. Melaksanakan pengelolaan pembayaran gaji pegawai.
- f. Menyetujui usulan pembayaran keuangan yang diajukan pelaksana kegiatan dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretariat.

Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :

1. Menyusun Rencana kerja Seksi Pemerintahan

2. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan koordinasi dengan instansi dilingkungan pemerintahan Kecamatan
3. Melaksanakan pembinaan dan Pengawasan pemerintah desa/ kelurahan;
4. Melaksanakan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil;
5. Melaksanakan Pelayanan Adminstrasi Kependudukan;
6. Melakukan Pembinaan teknis administrasi pertanahan/ keagrariaan;
7. Menyusun program pembinaan Sosial Politik dan ideologi negara dan kesatuan bangsa, dan
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat

Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas :

1. Menyusun rencanakerjaSeksiKetentramdanketertiban;
2. MelaksanakanKoordinasiupayapenyelenggaraanketentramdanketertiban
3. MelaksanakanPembinaanketentramdanketertibanumum
4. Melaksanakankoordinasipenerapandanpenegakanperaturanperundang - undangan
5. Menyelenggarakanpemberdayaanmasyarakatdibidangketentramdanketertibanu mum
6. Melaksanakan penanggulangan dini gangguan ketentraman dan ketertiban
7. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum
8. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan kesiagaan dan penanggulan bencana serta peningkatan sumberdaya manusia satuan perlindungan masyarakat, dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

1. Melaksanakan program dan pembinaan pembangunan perekonomian masyarakat Desa/Kelurahan;
2. Menyusun program dan pembinaan pengembangan kemampuan sumber daya masyarakat, akses modal dan pemasaran;
3. Menyusun program dan pembinaan dibidang produksi dan distribusi hasil produksi;
4. Menyusun program dan pembinaan peningkatan swadaya dan partisipasi untuk meningkatkan kehidupan pembangunan perekonomian masyarakat;
5. Menyusun program dan pembinaan lingkungan hidup;
6. Menyusun program dan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam penghijauan dan pengendalian pencemaran lingkungan;

7. Menyusun program dan pembinaan pembangunan fisik wilayah masyarakat Desa/ Kelurahan;
8. Menyusun program dan pembinaan pembangunan perekonomian masyarakat Desa/ Kelurahan;
9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kerja Seksi Kesejahteraan Rakyat;
2. Menyusun Program dan pembinaan bidang kepemudaan, peranan wanita dan kegiatan olah raga;
3. Menyusun Program dan Pembinaan bidang kehidupan keagamaan, pendidikan seni dan kebudayaan.
4. Menyusun Program dan Pembinaan bidang kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
5. Melaksanakan penanggulangan penyakit masyarakat dan bencana alam
6. Melaksanakan dan mengkoordinasikan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat
7. Melaksanakan Inventarisasi dan fasilitas penanggulangan masalah kesejahteraan masyarakat
8. Menyusun program dan pembinaan bantuan dan pelayanan social, dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Seksi Pelayanan Umum dan informasi

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas :

1. Menyusun program dan penyelenggaraan pelayanan umum dan administrasi kepada masyarakat
2. Menyusun program dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan
3. Menyusun program dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan kekayaan dan inventarisasi wilayah
4. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan, informasi dan pengaduan
5. Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan informasi, dan
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- I. Kelompok Jabatan fungsional dilingkungan Kecamatan mempunyai tugas pokok menunjang tugas pokok Kecamatan sesuai dengan bidang keahliannya.
2. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati
3. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2. Sumber Daya

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Peranan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Kantor Kecamatan Banyuates sangat dominan, itu dimungkinkan karena Kantor Kecamatan Banyuates merupakan suatu instansi yang bersifat fungsional, yang lebih membutuhkan keterampilan administrasi atau perkantoran yang diperlukan untuk menunjang kegiatan-kegiatan pelayanan pada masyarakat.

Dari segi Sumber Daya Manusia Kecamatan Banyuates didukung oleh 23 (Dua puluh tiga) orang sebagai Pegawai Negeri Sipil dan 2 (dua) orang terdiri dari Tenaga Honor Daerah. Jumlah pegawai yang ada belum cukup untuk dapat menangani segala permasalahan pelayanan dan operasional di Kantor Kecamatan Banyuates.

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin
(Posisi Per 30 Juni 2019)

No	Jenis Kelamin	Jumlah (org)
1	Laki - Laki	20
2	Perempuan	5
	Jumlah	25

Sumber : Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang, 2019

Jumlah personel Laki-laki 80% dan jumlah personel perempuan 20%. Hal ini menunjukkan pegawai Kecamatan Banyuates didominasi oleh laki-laki.

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan
(Posisi Per 30 Juni 2019)

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (org)
1	Pasca Sarjana (S2)	2
2	Sarjana (S1)	8
3	Diploma	-
4	SLTA	14
5	SLTP	1
6	SD	
	Jumlah	25

Sumber : Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang, 2019

Sebesar 8% pegawai Kecamatan Banyuates merupakan lulusan pasca sarjana (S2), 32% lulusan Sarjana (S1), 56% lulusan SLTA dan 4% lulusan SLTP. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa lebih dari setengah pegawai Kecamatan Banyuates merupakan lulusan SLTA. Tentunya kondisi personel tersebut merupakan kurangnya potensi SDM dalam menjalankan tupoksi sesuai bidang dan mendukung dalam pelayanan. Dari segi kualitas pegawai yang ada pada Kantor Kecamatan Banyuates masih kurang pegawai dengan disiplin ilmu bidang akuntansi dan bidang teknik sipil

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai Menurut Pangkat / Golongan Ruang
(Posisi Per 30 Juni 2019)

No	Golongan	Jumlah (org)
1	Pembina Tk I (IV/b)	1
2	Pembina (IV/a)	1
3	Penata Tk I (III/d)	5
4	Penata (III/c)	2
	Jumlah	9
5	Pengatur Tk. I (II/d)	1
6	Pengatur (II/c)	6
7	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	6
	Jumlah	13
	Juru Tingkat I (I/d)	1
	Jumlah	1
		-
	Honor daerah	2
	Jumlah	2
	Jumlah Keseluruhan	25

Sumber : Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang, 2019

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah pegawai terbanyak adalah Pengatur (II/c) yaitu 6 orang atau sebesar 24% dan Pengatur Muda Tk. I (II/a) yaitu 6 orang atau sebesar 24%

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Disamping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang telah dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung

pelaksanaan tugas dan fungsinya. Untuk prasarana gedung telah disediakan gedung yang cukup memadai untuk menampung pelaksanaan tugas.

Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Daftar Sarana dan Prasarana Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang
(Per 30 Juni 2019)

No.	Jenis Sarana/Prasarana	Satuan	Jumlah/Keterangan		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1	Bangunan gedung kantor	unit	1		
2	Tanah Bangunan Utk Kantor	unit	1		
3	Meubelair	unit	306	21	15
4	Perlengkapan Kantor	unit	42		
5	Kendaraan Dinas Operasional	unit	28		
	Roda 2	unit	28	1	3
6	Komputer PC / Laptop	unit	19		
	Komputer PC	unit	8		
	Laptop	unit	11	2	3
	Perlengkapan Komputer	unit	20		
7	Peralatan Kantor	unit	67		
8	Alat-alat Studio	unit	7		
	Alat pendingin	unit	10		

Sumber : Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang, 2019

Sarana dan prasarana diatas tentunya dimanfaatkan secara optimal demi mendukung kinerja pelayanan Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang. Diharapkan untuk lima tahun ke depan sarana prasarana yang rusak sudah tidak ada lagi demi stabilitas kinerja pelayanan Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran kinerja instansi pemerintah merupakan tahapan untuk melihat capaian kinerja instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran. Sebagai bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pengukuran kinerja merupakan tahapan penting untuk membandingkan antara target dalam penetapan kinerja dengan hasil yang diperoleh melalui pelaksanaan program dan kegiatan.

Hasil pengukuran kinerja yang dituangkan ke dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah disusun untuk mengukur capaian kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang memberikan informasi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan. Pengukuran dilakukan dengan mengukur capaian atas sasaran strategis yang telah diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja dengan indikator-indikator kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses mencatat, dan mengukur pencapaian sasaran, melalui hasil-hasil ataupun proses pelaksanaan suatu kegiatan. Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam proses pengukuran kinerja menitikberatkan pada upaya pencapaian hasil kerja atau outcome, tidak hanya pada penggunaan sumber dana. Indikator kinerja outcome adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka tertentu.

Suatu Perangkat Daerah dikatakan berhasil dalam pencapaian sasaran strategis dilihat dari prosentase nilai tingkat pencapaian indikator kinerjanya. Disamping itu, untuk mengetahui seberapa besar tingkat capaian kinerja. dalam satu tahun anggaran dilakukan dengan membandingkan kinerja pada tahun – tahun sebelumnya. Adapun Kriteria Penilaian Capaian Kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Kriteria Penilaian Capaian Kinerja

No	Nilai Capaian Kinerja	
	Interval Penilaian	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber : Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang, 2019

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang Tahun 2013-2018

NO.	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	Target NSPK	Target IKK	Target Ind. Lain	TARGET						REALISASI						CAPAIAN					
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Banyuates			100	0	79,02	79,02	80,00	81,00	81	0	79,02	79,02	79,35	80,08	80,27	0	100	100	99,18	98	99,09
a.	Angka Kriminalitas			0	5	5	7	10	14	14	3	5	6	10	14	18	60	100	85	100	100	128

Sumber : Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang, 2019

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -						Realisasi Anggaran pada Tahun ke -						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke - (%)						Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	1	2	3	4	5	6	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
BELANJA DAERAH																				
Belanja Tidak Langsung																				
- Belanja pegawai	1.821.297.724	1.548.083.456	1.634.500.415	1.690.022.924	2.487.928.116	2.110.664.611	1.485.654.603	1.576.951.210	1.744.970.586	1.953.469.077	1.959.715.597	1.951.812.420	82%	102%	107%	116%	116%	92%	5	6
													87%	90%	94%	91%	132%	95%	8,58	83
Belanja Langsung	385.801.777	316.108.335	421.978.660	395.475.980	576.399.940	507.299.700	335.020.923	284.427.352	395.250.363	360.741.052	521.278.600	480.620.729	69%	87%	90%	83%	84%	91%	6	10
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	145.268.77	159.81.3820	171.022.160	183.633.840	178.220.900	195.674.700	100.772.923	138.504.996	154.735.363	152.921.712	154.093.610	178.195.079	99%	93%	97%	99%	178%	98%	28	11
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100.629.500	148.877.155	220.510.000	161.325.640	295.575.040	254.985.000	99.344.500	138.504.996	214.069.500	159.832.840	286.842.260	249.585.650	100%						(40)	(40)
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	11.050.000		13.400.000	13.400.000			11.050.000			12.100.000			0%						(20)	-
Program Peningkatan kapasitas Sumber daya Aparatur	5.000.000		11.586.500	11.586.500									100%	100%	100%	58%	64%	98%	35	18
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	3.853.500	7.417.360	18.776.000	18.776.000	12.140.000	12.140.000	3.853.500	7.417.360	11.585.500	10.796.500	11.940.000	11.940.000	100%		100%	99%	101%	92%	(19,01)	(21)
Program Peningkatan keamanan Lingkungan	120.000.000	-	14.860.000	14.860.000	15.060.000	15.600.000	120.000.000		14.800.000	14.640.000	15.060.000	14.400.000				98%	101%	85%	3	(0)
Program Peningkatan tertib administrasi desa	-	-	10.670.000	10.670.000	10.870.000	12.200.000	-		-	10.450.000	10.770.000	10.400.000				98%	101%	85%	(13)	(12)
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	-	-	-	-	50.124.100	16.700.000	-		-		42.572.730	16.100.000					116%	92%	5	6

Sumber : Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang, 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2018 indikator sasaran “Persentase capaian indikator kinerja sasaran dalam RPJMD $\geq 90\%$ ” tidak tercapai 100%. Capaian indikator tersebut adalah 99,09%, capaian Indikator sasaran RPJMD $\geq 90\%$ sebanyak 1 indikator dari 1 Indikator sasaran.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi tidak berimplikasi terhadap pencapaian kinerja tugas dan fungsi kecamatan.

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan Target Belanja Tidak Langsung (BTL) dari Tahun 2013-2018 sebesar 5,00 persen, sedangkan realisasinya bertumbuh dengan rata-rata 6 persen. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah personel, besaran gaji dan tunjangan ASN Kecamatan Banyuates yang dianggarkan selama enam tahun terakhir.

Belanja Langsung (BL) merupakan jumlah total dari anggaran Program/Kegiatan Kecamatan Banyuates yang dialokasikan dari Tahun 2013-2018. Rata-rata pertumbuhan target Belanja Langsung sebesar 8,58 persen dan realisasinya sebesar 12,03 persen.

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Kecamatan Banyuates
Kabupaten Sampang

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -						Realisasi Anggaran pada Tahun ke -						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke - (%)						Rata-rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10	11	12	13	14		15	16	17	18
BELANJA DAERAH																				
BELANJA TIDAK LANGSUNG																				
- Belanja pegawai	1,821,297,724	1,548,083,456	1,634,500,415	1,690,022,924	2,487,928,116	2,110,664,611	1,485,654,603	1,576,951,210	1,744,970,586	1,953,469,077	1,959,715,597	1,951,812,420	82%	102%	107%	116%	116%	92%	5	6
BELANJA LANGSUNG	385,801,777	316,108,335	421,978,660	395,475,980	576,399,940	507,299,700	335,020,923	284,427,352	395,250,363	360,741,052	521,278,600	480,620,729	87%	90%	94%	91%	132%	95%	8.58	83
Program pelayanan administrasi perkantoran	145,268,777	159,813,820	171,022,160	183,633,840	178,220,900	195,674,700	100,772,923	138,504,996	154,735,363	152,921,712	154,093,610	178,195,079	69%	87%	90%	83%	84%	91%	6	10
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,629,500	148,877,155	220,510,000	161,325,640	295,575,040	254,985,000	99,344,500	138,504,996	214,069,500	159,832,840	286,842,260	249,585,650	99%	93%	97%	99%	178%	98%	28	11
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	11,050,000			13,400,000			11,050,000			12,100,000			100%						(40)	(40)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	5,000,000		4,000,000	11,586,500	-	-							0%						(20)	-
Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3,853,500	7,417,360	11,586,500	18,776,000	12,140,000	12,140,000	3,853,500	7,417,360	11,585,500	10,796,500	11,940,000	11,940,000	100%	100%	100%	58%	64%	98%	35	18
Program Peningkatan Keamanan dan Kenamanan Lingkungan	120,000,000	-	14,860,000	14,860,000	15,060,000	15,600,000	120,000,000	-	14,860,000	14,640,000	15,060,000	14,400,000	100%		100%	99%	101%	92%	(19.01)	(21)
Program Peningkatan Tertib Administrasi dan Pembinaan Aparatur Desa				10,670,000	10,870,000	12,200,000				10,450,000	10,770,000	10,400,000				98%	101%	85%	3	(0)
Program Peningkatan Iklim Inventasi dan Realisasi Inventasi					50,124,100	16,700,000					42,572,730	16,100,000						96%	(13)	(12)

2014	2015	2016	2017	2018	rata2 pertumnuhan	2014	2015	2016	2017	2018	rata2 pertumnuhan
(15.00)	5.58	3.40	47.21	(15.16)	5.21	6.15	11.95	11.95	0.32	(0.40)	5.99
(18.06)	33.49	(6.28)	45.75	(11.99)	8.58	(15.10)	(8.73)	(8.73)	44.50	(7.80)	0.827779
10.01	7.01	7.37	(2.95)	9.79	6.25	37.44	(1.17)	(1.17)	0.77	15.64	10.30
47.95	48.12	(26.84)	83.22	(13.73)	27.74	39.42	(25.34)	(25.34)	79.46	(12.99)	11.04
(100.00)			(100.00)		(40.00)	(100.00)			(100.00)		(40.00)
(100.00)					(20.00)						0.00
92.48	56.21	62.05	(35.34)	-	35.08	92.48	(6.81)	(6.81)	10.59	0.00	17.89
(100.00)		-	1.35	3.59	(19.01)	(100.00)	(1.48)	(1.48)	2.87	(4.38)	(20.89)
			1.87	12.24	2.82				3.06	(3.44)	(0.07)
				(66.68)	(13.34)					(62.18)	(12.44)

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan kerangka kerja penyusunan RPJMD, isu-isu strategis yang diuraikan dalam bab ini dirumuskan melalui analisis berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan terutama di bidang pelayanan.

Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Banyuates perlu mendapat perhatian untuk menentukan rencana kedepan. Dengan mengetahui permasalahan yang ada diharapkan semua program dan kegiatan yang direncanakan akan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Suatu permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dianggap memiliki nilai prioritas untuk dikerjakan apabila berhubungan dengan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya untuk mendukung pencapaian tujuan-tujuan pembangunan.

Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pelayanan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Perangkat Daerah

No.	Masalah	Pokok Masalah	Akar Masalah
1.	Pelayanan terhadap masyarakat kurang optimal	Kondisi sarana pelayanan yang kurang memadai	Faktor Internal: Keterbatasan SDM pada Kecamatan Banyuates dalam melaksanakan fungsi pelayanan Faktor Eksternal: Kurang optimalnya kekuatan server pelayanan dari dinas terkait yaitu Dispendukcapil
2.		Nilai SKM belum memenuhi target yang direncanakan.	Faktor Internal: Kondisi sarana pelayanan yang kurang memadai Faktor Eksternal: Pemahaman masyarakat yang berbeda terhadap prosedur pelayanan
3.	Angka Kriminalitas	Tingginya angka kriminalitas	Faktor Internal: Keterbatasan SDM pada Kecamatan Banyuates dalam

No.	Masalah	Pokok Masalah	Akar Masalah
			melaksanakan fungsi Pengamanan lingkungan Faktor Eksternal: Kesenjangan social di masyarakat

Sumber : Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang, 2019

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Kecamatan Banyuates yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Adapun visi dan misi tersebut tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 sebagaimana berikut:

Visi:
“Sampang Hebat Bermartabat”



Gambar 3.1
Misi Pembangunan Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

Dari visi-misi diatas, tugas dan fungsi Bappelitbangda mendukung pada pencapaian misi 4 yaitu **“Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik”**. Program aksi yang tertuang dalam RPJMD terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Banyuates yaitu Optimalisasi transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan kinerja pemerintahan daerah. Program aksi tersebut kelak akan dijabarkan dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Kecamatan Banyuates yang dijabarkan pada Tabel 3.1 akan dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

Tabel 3.2
Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih serta Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Visi : “Sampang Hebat Bermartabat”				
No	Misi dan Program Aksi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<p>“Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik”.</p> <p>Program Aksi: Optimalisasi transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan kinerja pemerintahan daerah</p>	<p>1 Pelayanan terhadap masyarakat kurang optimal</p> <p>2 Angka Kriminalitas</p>	<p>1 Keterbatasan SDM pada kecamatan Banyuates dalam melaksanakan fungsi pelayanan</p> <p>2 Kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang kurang memadai</p>	<p>1 Kebijakan pemerintah baik berupa Undang-undang, Peraturan menteri dan peraturan pendukung lainnya untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Banyuates secara ideal</p> <p>2 Komitmen pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien</p> <p>3 Perkembangan ilmu pengetahuan, penelitian dan pengembangan</p>

Sumber : Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang, 2019

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Telaahan ini tidak berimplikasi terhadap pencapaian kinerja tugas dan fungsi di Kecamatan Banyuates

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Seperti yang dijelaskan pada Bab II, struktur ruang dan pola ruang sesuai Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang tidak menimbulkan implikasi terhadap tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Banyuates.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Dari identifikasi permasalahan pelayanan dapat dirumuskan isu-isu strategis sebagai berikut:

- a. Kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang kurang memadai
- b. SDM pada Kecamatan Banyuates dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masih belum optimal
- c. Penggunaan teknologi informasi terhadap proses pelayanan yang masih belum maksimal.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran/implementasi dari sasaran RPJMD yang akan dilaksanakan/dicapai. Tujuan perangkat daerah yang mengacu pada RPJMD dikompilasikan dengan isu-isu dan analisis strategis serta merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu lima tahun. Tujuan ini tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Mengacu visi-misi RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya, Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang mendukung pada **misi 4** serta mendukung pada pencapaian sasaran **“Meningkatnya kualitas pelayanan publik”**, dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Banyuates adalah **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan”**. Sehingga penjabaran atas sasaran RPJMD tersebut menjadi tujuan yang akan dicapai Kecamatan Banyuates dalam kurun waktu 2019-2024. Adapun Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Banyuates Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	Kondisi Awal Renstra (2018)	TARGET						Kondisi Akhir Renstra (2024)
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Tujuan:									
	Meningkatnya kualitas pelayanan public	Nilai IKM	80,40	81,05	81,55	81,75	82,00	82,05	82,25	82,55
	Sasaran:									
1	Meningkatnya kualitas pelayanan public tingkat kecamatan	Nilai IKM Kecamatan Banyuates	80,40	81,05	81,55	81,75	82,00	82,05	82,25	82,55
	Indikator Kinerja Utama :									
2	Meningkatnya kualitas pelayanan public tingkat kecamatan	Nilai IKM Kecamatan Banyuates	s	81,05	81,55	81,75	82,00	82,05	82,25	82,55

Sumber : Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang, 2019

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Penentuan strategi Perangkat Daerah didasarkan pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya. Rumusan tujuan dan sasaran berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang sudah ditetapkan merupakan langkah awal dalam menyusun pilihan-pilihan strategi dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Strategi adalah langkah-langkah Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pelayanan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

Tahap pertama perumusan strategi adalah menetapkan tujuan dan sasaran pelayanan. Tahapan ini sudah di rumuskan pada bab sebelumnya. Strategi dan arah kebijakan Kecamatan Banyuates haruslah relevan dan konsisten dengan strategi dan arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024. Seperti telah dibahas pada bab sebelumnya Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang mendukung pada **misi 4** serta mendukung pada pencapaian sasaran **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”**.

Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
Misi 4: Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik						
T.4	Terselenggaranya reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan dan desa yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik	IT.8	Indeks Reformasi Birokrasi	1. Meningkatkan manajemen aparatur yang efektif dan profesional 2. Menerapkan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan	1. Penyediaan informasi publik yang memadai 2. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. 3. Peningkatan tugas pokok dan fungsi aparatur kecamatan	KECAMATAN BANYUATES
S.16	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IS.26	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			

Sumber : Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang 2019-2024

Tahap kedua adalah menyusun peta strategis dengan analisa SWOT (*strength, weakness, opportunity, dan threats*). Analisis SWOT merupakan analisis mengenai hal-hal pokok yang ada di lingkungan yang diasumsikan berpengaruh terhadap apa yang terjadi dan yang akan terjadi di lingkungan Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang mencakup dua lingkungan pokok, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Dengan menggunakan analisis SWOT, diharapkan dapat mengungkapkan faktor internal dan faktor eksternal yang dianggap penting dalam mencapai tujuan, yaitu dengan mengidentifikasi kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), kesempatan (*opportunity*), dan ancaman (*threat*)

Tabel 5.2
Analisis SWOT dalam Peta Strategi Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang

SW OT	<u>Kekuatan / Strength</u> Kebijakan pemerintah baik berupa Undang-undang, Peraturan menteri dan peraturan pendukung lainnya untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Banyuates secara ideal	<u>Kelemahan / Weakness</u> 1 Koordinasi dalam hal pelayanan lintas sektor masih belum optimal 2 Keterbatasan SDM dan sarana pelayanan
<u>Peluang / Opportunity</u> 1 Komitmen pemerintah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien 2 Perkembangan teknologi dan informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas pelayanan Perangkat Daerah • Menerapkan sistem pelayanan berbasis teknologi dan informasi 	Meningkatkan SDM bidang pelayanan baik dari segi kuantitas dan kualitas
<u>Ancaman / Threat</u> Target-target kinerja pelayanan yang tertuang dalam indikator tujuan dan sasaran tidak tercapai: a. Persentase capaian nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra	Meningkatkan koordinasi dalam hal pelayanan masyarakat

Sumber : Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang, 2019

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis pada bab sebelumnya, maka Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.3
Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang
Tahun 2019-2024

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan public tingkat kecamatan	Meningkatkan cakupan layanan informasi dan keterbukaan informasi publik	Penyediaan informasi publik yang memadai
		Meningkatkan manajemen aparatur yang efektif dan profesional	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
		Menerapkan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan	Peningkatan tugas pokok dan fungsi aparatur kecamatan

Sumber : Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang, 2019

INOVASI PELAYANAN KECAMATAN BANYUATES

Selain strategi dan arah kebijakan di atas, Kecamatan Banyuates juga melakukan inovasi pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi kecamatan yaitu **OKE PAKDE SISKA (Operasi Kejar Pelayanan Kelengkapan Dokumen Kependudukan yang Terintegrasi Sistem Kecamatan)** dimana pihak kecamatan melakukan pola pelayanan yang cukup sederhana atau tidak berbelit-belit melalui petugas operator desa yang ditunjuk untuk mengkoordinir semua bentuk pelayanan (Adminduk), maksudnya memberikan pelayanan yang memudahkan kepada masyarakat dengan memotong birokrasi yang terlalu panjang cukup operator Desa yang mengkoordinir masyarakat hanya untuk melakukan Perekaman secara manual di Kecamatan.

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Banyuates selama 2019-2024 merupakan program-program prioritas RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Banyuates . Rencana program dan kegiatan beserta pagu indikatif dijabarkan ke dalam matrik Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah. Program dan kegiatan yang dirumuskan di renstra ini kemudian dijadikan acuan dan pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Penjabaran program dan kegiatan-kegiatan tersebut terlampir dalam tabel matrik Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Banyuates Tahun 2019-2024 sebagaimana terlampir.

Tabel 6.1.
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikator
SKPD Kecamatan Banvuates Kabupaten Sambang

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2024							
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024									
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
Meningkatnya kualitas pelayanan publik tingkat kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik tingkat kecamatan	Nilai IKM Kecamatan Banyuates	4	05		Fungsi Penunjang Lainnya																					
			4	05	01	Program Pelayanan Administrasi dan jasa Perkantoran	Presentase pemenuhan layanan administrasi dan jasa perkantoran	%	0	1	247,203,500	1	359,763,500	1	421,643,600	1	440,544,000	1	459,822,000	1	494,274,200	1	2,423,250,800				
			4	05	01	01	Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	Jumlah surat terkirim	surat	1000	1000	113,473,000	1000	200,780,000	1000	247,184,000	1000	259,544,000	1000	272,522,000	1000	299,774,200	6000	1,393,277,200			
								cakupan pemenuhan kebutuhan listik dan air	bln	12	2		12		12		12		-	12		-	12		-		
								Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang memperoleh jasa perizinan	unit	14	14		14		14		14		14		14		14		-		
								Jumlah tenaga kebersihan	Ob	0	3		4		4		4		4		4		4		-		
								Jumlah alat kebersihan yang disediakan	Jenis	28			30		35		35		37		37		37		174	-	
						4	05	01	02	Penyediaan Sarana Administrasi Perkantoran	Jumlah ATK	Jenis	35	37	87,750,500	37	78,033,500	37	83,859,600	37	86,000,000	37	90,300,000	37	95,000,000	222	520,943,600
								Jumlah barang cetakan	jenis	7	8		12		12		12		-	20		-	20		84	-	
								Jumlah barang penggandaan	lmbr	2000	10000		####		####		####		30000		30000		30000		####	-	
					Jumlah komponen instalasi listrik	Jenis	9	24		24		24		28		30		30		30		160	-				
					Jumlah pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman rapat	kali	26	12		24		24		24		24		24		24		132	-				
					Jumlah pemenuhan kebutuhan bahan bacaan	Exp	360	360		360		360		360		360		360		360		360	-				
			4	05	01	03	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah koordinasi dalam daerah	kali	146	190	45,980,000	190	80,950,000	200	90,600,000	200	95,000,000	200	97,000,000	200	99,500,000	1180	509,030,000			

						Jumlah koordinasi ke luar daerah	kali	6	8	-	10	-	15	-	15	-	15	-	15	-	78	-			
			4	05	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	0	1	339,748,000	1	353,429,200	1	340,000,000	1	427,270,738	1	549,647,904	1	680,067,829	6	2,690,163,671		
			4	05	02	01	Pembangunan/Rehab/ Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	unit	1	1	32,765,000	1	169,504,600	1	19,140,000	1	28,710,000	1	93,078,055	1	113,283,868	6	456,481,523	
			4	05	02	02	Pembangunan/Rehab/ Pemeliharaan Rumah Jabatan	Jumlah Rumah dinas yang dipelihara	unit	1	1	11,880,000	1	10,080,000	1	93,355,000	1	25,500,000	1	30,000,000	1	55,928,961	6	226,743,961	
			4	05	02	03	Pengadaan/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	a. Jumlah kendaraan dinas R4 yang disediakan	unit	1	1	77,000,000	1	90,000,000	1	62,400,000	1	63,000,000	1	70,000,000	1	75,000,000	6	437,400,000	
			4	05	02	04	Pengadaan/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan kantor	unit	8	20	218,103,000	1	83,844,600	1	165,105,000	1	310,060,738	1	356,569,849	1	435,855,000	25	1,569,538,187	
							Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	unit	3	32													32	-	
							Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	unit	0	16														16	-
							Jumlah spanduk /umbul umbul/ bendera yang disediakan	buah	2	28														28	-
			4	05	03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur	%	0	0	-	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,250,000	1	6,500,000	1	10,000,000	5	31,750,000		
			4	05	03	01	Pelaksanaan Bimtek / Sosialisasi / Seminar	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek/sosialisasi/seminar	Ok	0	0	-	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,250,000	1	6,500,000	1	10,000,000	5	31,750,000	
			4	05	04	Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja, dan pelayanan publik yang baik dan tepat waktu	%	0	100	50,000,000	100	71,210,000	100	65,929,540	100	85,000,000	100	89,250,000	100	94,500,000	100	455,889,540		
			4	05	04	01	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	Jumlah Laporan Kemajuan Fisik/Non Fisik, Laporan Triwulan, Laporan Semester, Laporan Akhir Tahun, CALK, LKJIP	dok	0	6	10,000,000	6	15,015,000	6	11,255,000	6	17,000,000	6	17,850,000	6	20,000,000	36	91,120,000	

			4	05	04	02	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA	dok	0	3	15,000,000	3	18,935,000	3	17,517,540	3	23,000,000	3	24,150,000	3	26,000,000	18	124,602,540	
			4	05	04	03	Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen SKM	dok	0	1	25,000,000	1	37,260,000	1	37,157,000	1	45,000,000	1	47,250,000	1	48,500,000	6	240,167,000	
							Jumlah promosi pelayanan publik perangkat daerah		kali	0	2		2		2		-	2		-	2		12	-	
			4	05	37		Program Peningkatan Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	Persentase rekomendasi administrasi pelayanan umum yang ditindaklanjuti tepat waktu	%	0	100	153,579,500	100	140,925,500	100	144,718,000	100	165,823,375	100	187,251,425	100	207,500,000	100	999,797,800	
							Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti		%	0	100		100		100	-	100		100		-	100		100	-
							Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan		%	0	100		100		100		100		100		-	100		100	-
			4	05	37	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Lingkungan Sehat Perumahan	Pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung lingkungan sehat di ibukota kecamatan	paket	0	1	74,265,000	1	71,005,000	1	71,345,000	1	78,479,500	1	90,251,425	1	98,000,000	6	483,345,925	
			4	05	37	02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat terhadap Keamanan Lingkungan	Jumlah Satlinmas yang aktif	desa	0	1	8,400,000	1	10,800,000	1	10,800,000	1	13,340,000	1	15,000,000	1	20,000,000	6	78,340,000	
							Jumlah poskamling yang aktif		desa									-		-			0	-	
			4	05	37	03	Pembinaan dan Monitoring Pelayanan Administrasi Desa	Jumlah desa dengan administrasi yang baik	desa	20	1	34,909,500	20	20,175,000	20	20,175,000	20	23,000,000	20	25,000,000	20	27,500,000	20	150,759,500	
							Jumlah desa yang melaksanakan pilkades		desa	3			0		13		0		4		0		17	-	
			4	05	37	04	Fasilitasi administrasi pelayanan umum	Persentase permohonan administrasi layanan umum yang diproses	%	0		15,275,000	1	12,120,500	1	12,870,500	1	20,000,000	1	23,000,000	1	25,000,000	5	108,266,000	
			4	05	37	05	Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang RKPd di Kecamatan	Jumlah pra musrenbangcam	kali	0	1	20,730,000	1	26,825,000	1	29,527,500	1	31,003,875	1	34,000,000	1	37,000,000	6	179,086,375	
							Jumlah musrenbangcam		kali	0	1		1		1				1		1		6	-	

							Jumlah laporan hasil musrenbangcam	dok	0	1		1		1		1		1		6	-	

LAMPIRAN

Tabel L.1
Matrik Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Banyuates Tahun 2019-2024

Tujuan / Sasaran Renstra 2019-2024	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Kinerja dan Kerangka Pendanaan													
					2019		2020		2021		2022		2023		2024		Target Akhir RPJMD	
					target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.
Tujuan:																		
Meningkatnya kualitas pelayanan publik tingkat kecamatan.		1. Nilai IKM Kecamatan Banyuates	%	80.40	81.05	81.55	81.75	82.00	82.05	82.55	100.00	82.55						
Sasaran 1:																		
Meningkatnya kualitas pelayanan Publik tingkat kecamatan		1 Nilai IKM Kecamatan Banyuates	%	80.40	81.05	81.55	81.75	82.00	82.05	82.55	100.00	82.55						
4.05.	FUNGSI PENUNJANG LAINNYA																	
4.05.4.05.19.37	Program Peningkatan Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	1 Persentase rekomendasi administrasi pelayanan umum yang ditindaklanjuti tepat waktu	%	100	100.00	160,779,500	176,857,450	194,543,195	223,724,674	257,283,375	295,875,882	100.00	1,309,064,076					
		2 Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100.00	100.00													
		3 Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan	Desa	20	20	-												
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Lingkungan Sehat Perumahan	Pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung lingkungan sehat di ibukota kecamatan		1		74,265,000	81,691,500	89,860,650	98,846,715	108,731,387	119,604,525	0	572,999,777					
4.01.4.01.01.15.04.	Peningkatan Peran Serta Masyarakat terhadap Keamanan Lingkungan	a) Jumlah Satlinmas yang aktif b) Jumlah Poskamling yang aktif		42		8,400,000	9,240,000	10,164,000	11,180,400	12,298,440	13,528,284	0	64,811,124					
	Pembinaan dan Monitoring Pelayanan Administrasi Desa	a) Jumlah desa dengan administrasi yang baik b) Jumlah desa yang melaksanakan Pilkades		42		34,909,500	38,400,450	42,240,495	46,464,545	51,110,999	56,222,099	0	269,348,087					
	Fasilitasi Pelayanan Perijinan tingkat Kecamatan	Persentase Fasilitas Pelayanan Perijinan Kecamatan		42		22,475,000	24,722,500	27,194,750	29,914,225	32,905,648	36,196,212	0	173,408,335					
4.01.4.01.01.15.05.	Fasilitasi administrasi pelayanan umum	Persentase permohonan administrasi layanan umum yang diproses	100%	6								0	-					
	Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan	a) Jumlah pra musrenbangcam b) Jumlah musrenbangcam c) Laporan hasil musrenbangcam	a) 1 kali b) 1 kali c) 1 dok	4		20,730,000	22,803,000	25,083,300	27,591,630	30,350,793	33,385,872	0	159,944,595					
4.01.4.01.01.16.				100.00								100.00	-					
4.01.4.01.01.16.01.	Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi dan jasa perkantoran	%	1	100.00	255,353,500	280,888,850	308,977,735	355,324,395	408,623,055	469,916,513	300	2,079,084,048					

Tujuan / Sasasaran Renstra 2019-2024	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Kinerja dan Kerangka Pendanaan													
					2019		2020		2021		2022		2023		2024		Target Akhir RPJMD	
					target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.
	Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	a. Jumlah surat terkirim b. cakupan pemenuhan kebutuhan listrik, air, dan komunikasi c. Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang memperoleh jasa perizinan d. Jumlah tenaga kebersihan e. Jumlah alat kebersihan yang disediakan	a. surat b. 12 bulan c. unit d. ob e. Unit f. ob	1		114,973,000		126,470,300		139,117,330		159,984,930		183,982,669		211,580,069	0	936,108,298
4.01.4.01.01.16.02.	Penyediaan Sarana Administrasi Perkantoran	a. Jumlah ATK b. Jumlah barang cetakan c. Jumlah barang penggandaan d. Jumlah komponen instalasi listrik	a. jenis b. jenis c.	1		87,750,500		96,525,550		106,178,105		122,104,821		140,420,544		161,483,625	0	714,463,145
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	a. Jumlah koordinasi dalam daerah b. Jumlah koordinasi luar daerah	a. ok b. ok	1		52,630,000		57,893,000		63,682,300		73,234,645		84,219,842		96,852,818	0	428,512,605
4.01.4.01.01.16.03.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	1	100.00	341,548,000	100.00	367,202,800	100.00	403,923,080		464,511,542		534,188,273		614,316,514	300	2,725,690,210
	Pembangunan/Rehab/ Pemeliharaan Gedung Kantor	a. Jumlah gedung kantor yang dibangun b. Jumlah gedung kantor yang dipelihara		1		32,765,000		36,041,500		39,645,650	w	45,592,498		52,431,372		60,296,078	#VALUE!	266,772,098
4.01.4.01.01.16.04.	Pembangunan/Rehab/ Pemeliharaan Rumah Jabatan	a. Jumlah Rumah dinas yang dibangun b. Jumlah Rumah dinas yang dipelihara		1		11,880,000		13,068,000		14,374,800		16,531,020		19,010,673		21,862,274	0	96,726,767
4.01.4.01.01.16.05.	Pengadaan/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	a. Jumlah kendaraan dinas R4 yang diadakan b. Jumlah kendaraan dinas R2 yang diadakan b. Jumlah kendaraan dinas (R4) yang dipelihara		1		84,000,000		92,400,000		101,640,000		116,886,000		134,418,900		154,581,735	0	683,926,635
4.01.4.01.01.17.	Pengadaan/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	a. Jumlah pengadaan peralatan kantor b. Jumlah peralatan kantor yang dipelihara c. Jumlah pengadaan perlengkapan kantor		100.00		212,903,000		234,193,300		257,612,630		296,254,525		340,692,703		391,796,609	100.00	1,733,452,766
4.01.4.01.01.17.01.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur	%	0	100.00	5,000,000	100.00	8,500,000	100.00	9,350,000	100.00	10,285,000	100.00	11,827,750	100.00	13,601,913	600	58,564,663
	Pelaksanaan Bintek/Sosialisasi/Seminar	Jumlah ASN yang mengikuti bintek/sosialisasi/seminar		0		5,000,000		8,500,000		9,350,000		10,285,000		11,827,750		13,601,913	0	58,564,663
4.01.4.01.01.17.02.	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja, dan pelayanan publik yang baik dan tepat waktu	%	1	100.00	50,000,000	100.00	55,000,000	100.00	60,500,000	100.00	69,575,000	100.00	80,011,250	100.00	92,012,938	600	407,099,188

Tujuan / Sasasaran Renstra 2019-2024	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Kinerja dan Kerangka Pendanaan													
					2019		2020		2021		2022		2023		2024		Target Akhir RPJMD	
					target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.
	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	Jumlah Laporan Kemajuan Fisik/Non Fisik, Laporan Triwulan, Laporan Semester, Laporan Akhir Tahun, CALK, LKJIP		1		10,000,000		11,000,000		12,100,000		13,915,000		16,002,250		18,402,588	0	81,419,838
4.01.4.01.01.17.03.	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA		0		15,000,000		16,500,000		18,150,000		20,872,500		24,003,375		27,603,881	0	122,129,756
	Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	a. Jumlah Dokumen SKM b. Jumlah promosi pelayanan publik perangkat daerah		0		25,000,000		27,500,000		30,250,000		34,787,500		40,005,625		46,006,469	0	203,549,594

**BAB VII
KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN**

Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang mendukung pada **misi 4** serta mendukung pada pencapaian sasaran sasaran **“Meningkatnya kualitas pelayanan publik ”**. Indikator kinerja Kecamatan Banyuates yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 merupakan indikator kinerja yang berpengaruh secara langsung terhadap pebcapaian kinerja tujuan dan sasaran RPJMD tersebut.

Indikator tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Banyuates mengacu pada indikator tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No.	Tujuan/Sasaran/Indikator	Kondisi Awal RPJMD (2018)	Target						Kondisi Akhir RPJMD (2024)
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
T.4 Terselenggaranya reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan dan desa yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik									
IT.8	Indeks Reformasi Birokrasi	75,00	76,00	77,00	78,00	79,00	80,00	81,00	81,00
S.17 “Meningkatnya kualitas pelayanan publik ”.									
IS.31	Nilai IKM	80,40 (A)	81,05 (A)	81,55 (A)	81,75 (A)	82,00 (A)	82,05 (A)	82,55 (A)	82,55 (A)

Sumber : Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang, 2019

Tabel 7.2
Keterhubungan Renstra Kecamatan Banyuates dengan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

SASARAN RPJMD		TUJUAN RENSTRA KECAMATAN BANYUATES		SASARAN RENSTRA KECAMATAN BANYUATES		Kondisi Awal (2018)	TARGET						Kondisi Akhir (2024)
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya kualitas pelayanan public tingkat kecamatan	Nilai IKM Kecamatan Banyuates	Meningkatnya kualitas pelayanan public tingkat kecamatan	Nilai IKM Kecamatan Banyuates	80,40	81,05	81,55	81,75	82,00	82,05	82,55	82,55

Sumber : Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang, 2019

BAB VIII PENUTUP

Renstra Kecamatan Banyuates Tahun 2019-2024 adalah dokumen perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah dan merupakan penjabaran atas RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024. Dalam Renstra ini memuat gambaran pelayanan perangkat daerah, permasalahan dan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta kinerja penyelenggaraan bidang urusan.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Banyuates pada Renstra periode sebelumnya, secara total rata-rata capaian keseluruhan indikator kinerja pelayanan adalah 99,46 % atau sangat baik. Dari identifikasi permasalahan pelayanan maka dirumuskanlah isu-isu strategis Renstra Tahun 2019-2024 yaitu Kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang kurang memadai, SDM pada Kecamatan Banyuates dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masih belum optimal serta penggunaan teknologi informasi terhadap proses pelayanan yang masih belum maksimal.

Mengacu pada visi-misi RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024, Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang mendukung pada misi 4 RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 serta mendukung pada pencapaian sasaran “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik tingkat Kecamatan”. Hal tersebut berimplikasi pada rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Banyuate selama 2019-2024. Program-program tersebut merupakan program-program prioritas RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Banyuates.

Selanjutnya dokumen Renstra ini dijadikan acuan Kecamatan Banyuates dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan dan sebagai pedoman serta tolak ukur pengendalian dan evaluasi kinerja yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Banyuates dalam kurun waktu lima tahun. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah –kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Kecamatan Banyuates sebagai koordinator (Fasilitator) wilayah berkewajiban untuk melaksanakan Program-Program Kabupaten Sampang sebagai satuan kerja lintas sektor dengan seabik-baiknya.
2. Rencana Strategis Kecamatan Banyuates merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Banyuates.

3. Rencana Strategis Kecamatan Banyuates merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahun Kecamatan Banyuates.
4. Kecamatan Banyuates berkewajiban menjaga konsistensi antara rencana Strategis Kecamatan Banyuates dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016-2021.

Semoga dengan disusunnya Rencana Strategis Kecamatan Banyuates ini dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang.

BUPATI SAMPANG

H.SLAMET JUNAIDI

Rancangan Misi RPMD Kabupaten : Memperkuat tata Kelola Pemerintahan dan Desa yang Transparan, Akuntabel dan Berorientasi pada Pelayanan Publik

Tujuan Kabupaten : Menyelenggarakan Reformasi Birokrasi melalui tata kelola Kepemerintahan dan desa yang Profesional dan berorientasi pada pelayanan Publik

Indikator Kabupaten : Indeks Reformasi Birokrasi

Sasaran Kabupaten : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	PROGRAM	INDIKATOR	Rumus	TARGET	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien	Nilai SKM Kecamatan	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien	Nilai SKM Kecamatan	Meningkatkan Pelayanan Publik dan Pengembangan Teknologi Informasi	Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Jenis Administrasi dan Jasa Perkantoran yang dipenuhi/yang dibutuhkan*100% (diambil capaian kinerja output yang terpenuhi, kalau ada kinerja output yg tidak terpenuhi dihitung desimal capaiannya)	100%	Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	a) Jumlah surat terkirim b) Jumlah pemenuhan kebutuhan listrik, air, dan komunikasi c) Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang memperoleh jasa perizinan d) Jumlah tenaga kebersihan e) Jumlah alat kebersihan yang disediakan	a) ... surat b) ... bulan c) ... unit d) ... OB e) ... Buah
										Penyediaan Sarana Administrasi Perkantoran	a) Jumlah ATK yang tersedia b) Jumlah barang cetakan c) Jumlah barang penggandaan d) Jumlah komponen instalasi listrik e) Jumlah spanduk/umbul-umbul/bendera yang disediakan f) Jumlah pemenuhan bahan bacaan g) Jumlah Pemenuhan Kebutuhan makanan dan minuman rapat	a) buah b) buah c) lembar d) buah e) buah f) bulan g) OK

									Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	a) Jumlah koordinasi dalam daerah b) Jumlah koordinasi luar daerah	a) ... OK b) ... OK	
						Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik/Jumlah seluruh sarana dan prasarana*100% %	Pembangunan /Rehab/ Pemeliharaan Gedung Kantor	a) Jumlah gedung kantor yang dibangun b) Jumlah gedung kantor yang dipelihara	a) ... unit b) ... unit
								(diambil dari buku inventaris barang)		Pembangunan /Rehab/ Pemeliharaan Rumah Jabatan	a) Jumlah Rumah dinas yang dibangun b) Jumlah Rumah dinas yang dipelihara	a) ... unit b) ... unit
										Pengadaan/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	a) Jumlah kendaraan dinas yang diadakan b) Jumlah kendaraan dinas (R4) yang dipelihara	a) ... unit b) ... unit

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
										Pengadaan/Pe meliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	a) Jumlah pengadaan peralatan kantor b) Jumlah peralatan kantor yang dipelihara c) Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	a) unit b) ... Unit c) unit
						Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek/sosialisasi/ seminar dibagi jumlah seluruh aparatur yang direncanakan	... %	Pelaksanaan Bimtek/Sosialis asi/Seminar	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek/sosialisasi/seminar OK
						Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang baik dan tepat waktu	Jumlah dokumen capaian kinerja keuangan yang baik dan tepat waktu/Jumlah dokumen capaian kinerja keuangan yang disusun	100% (jumlah dokumen yang terselesa ikan dengan baik dan tepat waktu)	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	Jumlah Laporan Kemajuan Fisik/Non Fisik, Laporan Triwulan, Laporan Semester, Laporan Akhir Tahun, CALK, LKJIP	6 dok
										Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Panganggaran	Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA	4 dok

									Peningkatan Pelayanan Publik	a) 1 Dokumen SKM b) Jumlah promosi pelayanan publik perangkat daerah	a) 1 dok b) 1 Kali	
						Peningkatan Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	Persentase pemenuhan pelayanan publik tingkat kecamatan yang berkualitas	Jenis pelayanan publik tingkat kecamatan berkualitas yang dipenuhi/yang dibutuhkan*100%	100%	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Lingkungan Sehat Perumahan	Pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung lingkungan sehat di ibukota kecamatan paket
										Peningkatan Peran Serta Masyarakat terhadap Keamanan Lingkungan	Jumlah monitoring keamanan lingkungan desa yang dilaksanakan kali
								(diambil capaian kinerja output yang terpenuhi, kalau ada kinerja output yg tidak terpenuhi dihitung desimal capaiannya)		Pembinaan dan Monitoring Pelayanan Administrasi Desa	a) Jumlah desa dengan administrasi yang baik b) Jumlah desa yang melaksanakan Pilkades	a) Desa b) Desa
										Fasilitasi Pelayanan Perijinan Tingkat kecamatan	a) Persentase pelayanan perijinan yang diproses b) Persentase pelayanan non perijinan yang diproses	a) % b) %
										Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan	a) Jumlah pra musrenbangcam b) Jumlah musrenbangcam c) Laporan hasil musrenbangcam	a) 1 kali b) 1 kali c) 1 dok

PROGRAM RPJMD TAHUN 2019 - 2024 KECAMATAN BANYUATES

Misi 4 : Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik

SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN RPJMD		Program	Indikator Program	Kondisi Awal RPJMD	Target 2019		Target 2020		Target 2021		Ta	
					Kinerja	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	
17	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	29	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Program Peningkatan Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	1.Persentase desa dengan dokumen perencanaan dan pengelolaan keuangan sesuai pedoman	100%	100%	34,909,500.00	100%	38,400,450	100%	42,240,495	100%
					2. Persentase perijinan sesuai dengan SOP	100%	100%	22,475,000	100%	24,722,500	100%	27,194,750	100%
					fasilitasi musrenbang			20,730,000		22,803,000		25,083,300	
					sanitasi lingk.sehat			74,265,000		81,691,500		89,860,650	
				Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	100%	255,353,500	100%	280,888,850	100%	308,977,735	100%
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	100%	341,548,000	100%	367,202,800	100%	403,923,080	100%
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur	100%	100%		100%	8,500,000	100%	9,350,000	100%

			Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang baik dan tepat waktu	100%			100%	50,000,000	100%	55,000,000	100%	60,500,000	100%
Misi 5 : Mewujudkan harmonisasi kehidupan masyarakat yang waspada, tanggap, tertib, damai dan bersatu														
20	Meningkatnya kenyamanan, ketertiban dan keamanan lingkungan serta penyelesaian konflik sosial	37	Persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban	Program Perlindungan Masyarakat	Cakupan desa dengan pelayanan perlindungan masyarakat	20 desa	20 desa	8,400,000	7 desa	9,240,000	7 desa	10,164,000	7 desa	
								807,681,000		888,449,100		977,294,010		

Target 2022	Target 2023		Target Akhir RPJMD 2024		PD PENANGGUNG JAWAB
Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
48,576,569	100%	55,863,055	100%	64,242,513	Kec. Banyuates
31,273,963	100%	35,965,057	100%	41,359,815	Kec. Banyuates
28,845,795		33,172,664		38,148,564	Kec. Banyuates
103,339,748		118,840,710		136,666,816	Kec. Banyuates
355,324,395	100%	408,623,055	100%	469,916,513	Kec. Banyuates
464,979,043	100%	534,725,899	100%	614,934,784	Kec. Banyuates
10,285,000	100%	11,827,750	100%	13,601,913	Kec. Banyuates

69,575,000	100%	80,011,250	100%	92,012,938	Kec. Banyuates
		-		-	
11,688,600	7 desa	13,441,890	7 desa	15,458,174	Kec. Banyuates
		-			
1,123,888,113		1,292,471,329		1,486,342,029	

PROGRAM RPJMD TAHUN 2019 - 2024 KECAMATAN BANYUATES

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL	TARGET						
				2019	2020	2021				
Menyelenggarakan reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan dan desa yang profesional dan berorientasi pada pelayanan Publik	Indek reformasi birokrasi		75		80		82		84	

Misi 4 : Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik

SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN RPJMD	Program	KONDISI Awal RPJMD	Target 2019		Target 2020		Target 2021		Ta
			Kinerja	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja

17	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	29	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Program Peningkatan Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	100%	100%
----	--	----	----------------------------------	--	------	------

34,909,500.00	100%	38,400,450	100%	42,240,495	100%
---------------	------	------------	------	------------	------

			100%	100%	22,475,000	100%	24,722,500	100%	27,194,750	100%
--	--	--	------	------	------------	------	------------	------	------------	------

					20,730,000		22,803,000		25,083,300	
--	--	--	--	--	------------	--	------------	--	------------	--

					74,265,000		81,691,500		89,860,650	
--	--	--	--	--	------------	--	------------	--	------------	--

		Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	100%							
				100%	255,353,500	100%	280,888,850	100%	308,977,735	100%

		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%								
				100%	341,548,000	100%	367,202,800	100%	403,923,080	100%	

		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%							
				100%		100%	8,500,000	100%	9,350,000	100%

			Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%								
					100%	50,000,000	100%	55,000,000	100%	60,500,000	100%	
Misi 5 : Mewujudkan harmonisasi kehidupan masyarakat yang waspada, tanggap, tertib, damai dan bersatu												
20	Meningkatnya kenyamanan, ketertiban dan keamanan lingkungan serta penyelesaian konflik sosial	37	Persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban	Program Perlindungan Masyarakat	20 desa	20 desa	8,400,000	7 desa	9,240,000	7 desa	10,164,000	7 desa

					807,681,000		888,449,100		977,294,010	

T KINERJA					
2022	2023		2024		Target Akhir RPJMD
86		88		90	

Target 2022	Target 2023		Target Akhir RPJMD 2024		PD PENANGGUNG JAWAB
Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	

48,576,569	100%	55,863,055	100%	64,242,513	Kec. Banyuates
------------	------	------------	------	------------	----------------

31,273,963	100%	35,965,057	100%	41,359,815	Kec. Banyuates
------------	------	------------	------	------------	----------------

28,845,795		33,172,664		38,148,564	Kec. Banyuates
------------	--	------------	--	------------	----------------

103,339,748		118,840,710		136,666,816	Kec. Banyuates
-------------	--	-------------	--	-------------	----------------

355,324,395	100%	408,623,055	100%	469,916,513	Kec. Banyuates
-------------	------	-------------	------	-------------	----------------

464,979,043	100%	534,725,899	100%	614,934,784	Kec. Banyuates
-------------	------	-------------	------	-------------	----------------

10,285,000	100%	11,827,750	100%	13,601,913	Kec. Banyuates
------------	------	------------	------	------------	----------------

69,575,000	100%	80,011,250	100%	92,012,938	Kec. Banyuates
		-		-	
11,688,600	7 desa	13,441,890	7 desa	15,458,174	Kec. Banyuates

		-			
1,123,888,113		1,292,471,329		1,486,342,029	